

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan harga Kabupaten BOMBANA didasarkan pada informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Bombana yang dikeluarkan secara
2. Harga rata-rata komoditas pada triwulan III seperti beras, jagung, daging sapi, daging ayam ras dan gula pasir, minyak goreng, dan bawang putih relatif stabil selama 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak memiliki gejolak harga.
3. Harga rata-rata komoditas menurun seperti Bawang merah, cabai besar, Cabai rawit selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan keterangan sebagai berikut.

i). Komoditas bawang merah drastis menurun sebesar Rp. 30,000 atau 42% pada bulan Juli ke Agustus dan pada bulan September turun Rp.5000 atau 11 %. Penurunan harga diperkirakan akibat rendahnya kebutuhan masyarakat dan banyaknya stok akibat suply bawang merah dari luar Kabupaten Bombana. dari aktifnya gerakan tanam masyarakat dan pada kelompok wanita tani, serta banyaknya masyarakat ketersediaan melebihi Stok kebutuhan yang konsumen.

ii). Komoditas Cabai Besar turun sebesar Rp. 30.000 atau 33 % pada Bulan Juli ke Bulan Agustus dan Bulan Agustus ke September turun Rp. 4.000 atau 7 %, dari aktifnya gerakan tanam masyarakat dan pada kelompok wanita tani, serta banyaknya masyarakat ketersediaan melebihi Stok kebutuhan yang konsumen

30. Komoditas Cabe Rawit turun pada bulan Juli ke Bulan Agustus sebesar Rp.30.000 atau 30% dari bulan Agustus turun sebesar Rp 8.000 atau 1,3 % karena produksi cabe rawit meningkat (masyarakat banyak yang panen cabe).

No	Komoditas	Rata-rata harga Juli 2022 (Rp/Kg)	Rata-rata harga Agustus 2022 (Rp/Kg)	Rata-rata harga Sep 2022 (Rp/Kg)
1	Beras	12.000	12.000	12.000
2	Jagung	8.400	8.400	8.400
3	Bawang Merah	70.000	45.000	40.000
4	Bawang Putih	30.000	30.000	30.000
5	Cabai Besar	90.000	60.000	56.000
6	Cabai Rawit	100.000	70.000	62.000
7	Daging Sapi/Kerbau	130.000	130.000	130.000
8	Daging Ayam Ras	37.500	37.500	37.500
9	Telur Ayam Ras	30.500	35.000	33.300
10	Gula Pas			

Kendala yang dihadapi oleh TPID Kabupaten Bombana pada pelaksanaan pengendalian inflasi dengan kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) adalah sebagai berikut.

1. Tingginya ketergantungan Kabupaten Bombana dengan Daerah lain terkait komoditas bawang merah.
2. Kapasitas produksi untuk komoditas bawang merah masih terbatas dan masih disuply dari Bima dan Kabupaten Prov Sulawesi Selatan.
3. Faktor cuaca hujan yang tidak mendukung untuk komoditas bawang merah dan cabai.

Keterbatasan stok di pasaran sehingga memicu kenaikan harga (contohnya minyak Goreng).

1. Terbatasnya informasi komoditas pangan strategis Sulawesi Tenggara, seperti (1) informasi surplus dan defisit, (2) informasi pola tanam komoditas, (3) informasi kebutuhan dan konsumsi komoditas strategis untuk mendukung arah kebijakan strategis.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
1. Rapat Koordinasi TPID Kab. Bombana yang diikuti oleh Forkopimda, Kepala OPD, Bulog Capem Bombana pada Tanggal Rapat Koordinasi pada tanggal 30 Agustus Tahun 2022 membahas tentang 6 langkah Strategi dalam pengendalian Inflasi .
 2. Rapat pemantapan Penyusunan Road Map Perekonomian 9 Juni 2022 sebagai tindak lanjut untuk penekanan Inflasi . jangka panjang 3 tahun ke depan
 3. Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang membahas tentang 6 langkah strategis dalam pengendalian Inflasi,pada tanggal 30 Agustus 2022
 4. Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang membahas terkait,mempercepat pergerakan giat tanam padi sampai panen raya dalam penanganan stok dan ketersediaan.
 5. Pelaksanaan kegiatan Sidak harga dan Barang Kadaluarsa pada Tadoha Mappacing untuk mendorong stabilitas harga dan terjadinya penumpukan barang
 6. Louching penyerahan bantuan Sosial Dampak kenaikan BBM oleh kelompok UMKM
 7. Kegiatan Pasar murah implementasi Gerakan Tanam Cabe,pada tanggal 25 September oleh Dinas Perindakop
 8. Louching Aplikasi Simda Master pada tanggal 29 September 2022 oleh Dinas Pertanian dengan alokasi anggaran Rp. 99.855.000,-
 9. Surat Keputusan Bupati Bombana No. 581 Tahun 2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Bantuan Sosial berupa Uang pada Individu di Kabupaten Bombana
 10. Surat Penunjukan Nomor 750/1984 Tanggal 22 September 2022 tentang Petugas Pemantau Distributor Pangan di Kabupatn Bombana.
 11. Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Subsidi Suku Bunga Kredit Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Bombana.
 12. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten Bombana Dengan BMKG No. 520/1034/2022 dan Nomor : HM.02.00 /001/KKWS/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penyediaan Layanan Data dan Informasi Pertanian Terpadu melalui Aplikasi Simda Master.
 13. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten Bombana Dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (

B-891/H.12.22/8/2022 Tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penyediaan Layanan Data dan Informasi Pertanian Terpadu melalui Aplikasi Simda Master.

14. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten Bombana dengan CV. Technos's Studio No. 520/1040/2022 dan Nomor : 001/TS-MOU/VIII/Tahun tentang Penyediaan Layanan Data dan Informasi Pertanian Terpadu melalui Aplikasi Simda Master.
15. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten Bombana dengan Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bombana No. 520/1035/2022 dan Nomor : 001/20003/08/2022 tentang Penyediaan Layanan Data dan Informasi Pertanian Terpadu melalui Aplikasi Simda Master.
16. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten Bombana dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana No. 520/1038/2022 dan Nomor : B-25/74063/KA.110/08/2022 tentang Penyediaan Layanan Data dan Informasi Pertanian Terpadu melalui Aplikasi Simda Master.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Perluasan inovasi kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak akibat tingginya harga komoditas pangan saat ini.
2. Mendorong penguatan sarana dan prasarana produksi pangan untuk mendorong tingginya produksi pangan di wilayah Kabupaten Bombana.
3. Perlunya mengevaluasi kembali jalur perdagangan di wilayah Kabupaten Bombana sehingga untuk menentukan skema kerjasama antar daerah ke depan. Jalur perdagangan tersebut termasuk untuk mengurangi keterlibatan agen yang dapat meningkatkan harga.
4. Perlunya penyelerasan program kerja pemerintah daerah dengan rekomendasi dari pemerintah pusat untuk mengendalikan inflasi.
5. Perlunya pemantauan harga dan stok secara berkala untuk mengidentifikasi kondisi harga dan pasokan komoditas strategis. Saat ini harga sudah tersedia di Dinas Perindagkop dan data stok pada Dinas Ketahanan Pangan, namun kurangnya komunikasi menyebabkan informasi belum dapat digunakan secara lebih komprehensif.
6. Perlunya pendampingan intensif kepada nelayan atau petani untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditas karena saat ini komoditas. Saat ini masih banyak petani atau nelayan yang menanam tanpa melihat kondisi cuaca.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Memperkuat koordinasi antar OPD untuk secara konsisten melakukan pembaharuan data pasokan, kebutuhan, dan harga sehingga dapat menjadi langkah awal dalam menentukan upaya pengendalian kedepan dan memitigasi kemungkinan terjadinya keterbatasan suplai.
2. Memantau keberlanjutan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) sebagai bentuk pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
3. Mendorong terbentuknya pasar digital untuk mempermudah pemantauan harga dan pasokan secara berkala, serta mereduksi ketimpangan harga antar daerah.
4. Terus memperkuat sinergi TPID terutama dalam mewujudkan 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) melalui kegiatan sidak pasar, pengembangan komoditas pangan strategis menggunakan teknologi tepat guna, serta pendampingan dan fasilitasi kelompok t

Melaksanakan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan.

6. Penetapan pelaksana kegiatan swakelola ternak sapi dan ayam petelur dalam rangka mendukung kegiatan peningkatan produksi daging sapi dan telur ayam.